

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

##### 4.1.1 Penerapan Collaborative Governance dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Legok

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Penerapan Collaborative Governance dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Legok Kota Jambi, peneliti telah menganalisis lima indikator utama sesuai dengan teori Ansell dan Gash. Melalui serangkaian wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Tim Konsultan Program KOTAKU, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan masyarakat Kelurahan Legok, ditemukan berbagai dinamika dalam implementasi *collaborative governance*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dialog Tatap Muka (Face To Face): telah terlaksana melalui rapat koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan partisipatif yang memberi ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat. Masih menghadapi tantangan berupa kurangnya kepercayaan masyarakat dan partisipasi yang belum optimal.
2. Membangun Kepercayaan (Trust Building): dilakukan melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam diskusi, dimana adanya transparansi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Namun, masih terdapat kendala berupa sikap tertutup sebagian masyarakat dan resistensi terhadap perubahan.

3. **Komitmen Terhadap Proses (Commitment to Process):** terwujud melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Peran aktif Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam menggerakkan partisipasi warga.
4. **Pemahaman Atas Keputusan Bersama (Share Understanding):** telah dilakukan melalui musyawarah kelurahan dan sosialisasi di tingkat RT/RW. Masih terdapat kendala berupa ketidakhadiran sebagian warga dalam sosialisasi. Beberapa keputusan teknis masih menimbulkan kebingungan di masyarakat.
5. **Hasil Sementara (Intermediate Outcomes):** para stakeholder telah berhasil melakukan pemetaan dan identifikasi kawasan kumuh yang menjadi prioritas. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang layak. Telah tercapainya kolaborasi antar stakeholder sesuai tupoksi masing-masing. Namun, dalam implementasi program KOTAKU ditemukan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi para stakeholder sehingga pengentasan permukiman kumuh masih belum terselesaikan.

#### **4.1.2 Peran dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program KOTAKU sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Setiap

stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, namun saling terkait satu sama lain dalam mencapai tujuan program.

Peran dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah terstruktur dengan baik, diantaranya yakni di tingkat nasional oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, tingkat daerah, tingkat daerah oleh Pokja PKP yang melibatkan berbagai instansi, tingkat kelurahan melibatkan Lurah, BKM, KSM serta masyarakat yang berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan berbagai temuan dan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan pengembangan Program KOTAKU di masa mendatang. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun collaborative governance dalam Program KOTAKU di Kelurahan Legok telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program. Berikut ini disampaikan beberapa saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Program KOTAKU, khususnya di Kelurahan Legok Kota Jambi:

1. Pemerintah lebih meningkatkan intensitas sosialisasi program dengan metode yang lebih efektif dan menarik, memperkuat koordinasi antar instansi terkait untuk menghindari tumpang tindih program, mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung

keberlanjutan program serta memberikan pendampingan teknis yang lebih intensif kepada masyarakat.

2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) harus dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program serta meningkatkan kapasitas internal yang lebih efektif dalam menggerakkan masyarakat.
3. Masyarakat bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam program KOTAKU, berperan aktif dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun, serta terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan tentang evaluasi program KOTAKU dalam jangka panjang.